

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi tidak dapat dibicarakan secara terpisah atau tanpa mengaitkan dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokratis, dan demokratis merupakan salah satu cara paling aman untuk mengontrol atas negara hukum. Inilah prinsip negara hukum yang demokratis (*democratiche rechtsstaat*) dan prinsip negara demokratis yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*).¹

Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dipandang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini adalah sistem demokrasi. Sebagai wujud dari prinsip kedaulatan rakyat, dalam sistem penyelenggaraan dan negara yang demokratis itu harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Namun bagaimanapun juga, selalu ada jarak antara rakyat yang berdaulat dengan penyelenggara negara atau pelaksana kedaulatan itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada institusi dan mekanisme yang menjamin partisipasi rakyat. Tanpa hal itu, kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan yang otoriter. Tanpa mekanisme tersebut sistem perwakilan dapat bergeser menjadi manipulasi dan paksaan oleh pemegang kekuasaan. Institusi dan mekanisme tersebut adalah partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum secara berkala.²

Dikebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan pilar-pilar demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 87.

² Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan MK RI, 2006), 115-116.

perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Peserta dalam pemilu adalah partai politik, partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih rakyat.

Partai politik pada era demokrasi modern, saat ini dipandang sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Indonesia adalah salah satu negara yang juga menerapkan sistem partai politik demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, sehingga partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam mengimplentasikan prinsip kedaulatan rakyat.³ Mahfud MD mengatakan bahwa negara demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik di Indonesia saat ini, partai politik dikatakan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Keberadaan partai politik dikatakan sebagai salah satu indikator berjalannya sistem politik yang menaungi keberadaan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini tidak lepas dari beberapa fungsi yang dijalankan partai politik sebagai representasi rakyat dalam proses politik (pembuatan kebijakan negara).⁵

Partai politik mempunyai tujuan dan fungsi secara umum, tujuan umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang b). menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi

³ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, 44.

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

⁵ Deden Fathurohman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: UMM, Press, 2002), 269.

kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya tujuan khususnya adalah a). meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b). memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶

Salah satu tujuan dan fungsi partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat. Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dari *capere*, yang artinya mengambil, sehingga diartikan "mengambil bagian". *Participate* atau *participation* dalam bahasa Inggris berarti mengambil bagian atau peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Pandangan J.J Rousseau memberikan suatu makna bahwa sebuah pemerintahan yang demokratis haruslah melibatkan partisipasi dari rakyat.⁷

Dasar dari Negara yang menganut sistem demokrasi adalah sebuah partisipasi masyarakat, hal ini sesuai dengan pengertian istilah demokrasi yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Partisipasi masyarakat merupakan dasar pelaksanaan demokrasi sesuai cita-cita negara demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.⁸ Partisipasi dapat diartikan sebagai orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang berperan serta dalam kegiatan politik.⁹ Kegiatan politik tentu mempunyai keanekaragaman dari sisi bentuk dan substansi, salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjalankan hak dan kewajibannya untuk memilih para wakil rakyat melalui pemilu legislatif baik legislatif tingkat pusat maupun pada tingkat

⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁷ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Alumni, 2011), 155-213.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Jakarta: PT refika Aditama, 2009), 136.

⁹ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

daerah serta pemilu kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah.

Partai politik yang ada di Indonesia sangat beragam, dan jumlahnya sangat banyak. Pada pemilu legislatif tahun 2014 terdapat 12 partai politik nasional, dan 3 partai lokal di Aceh. Sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2019 mendatang terdapat 16 partai politik nasional, dan 4 partai lokal di Aceh. Salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB yang selanjutnya disebut partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Dewan pimpinan pusat partai berkedudukan di Jakarta atau ibukota negara Republik Indonesia. Wilayah partai meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terstruktur sesuai jenjang administrasi pemerintahan dan wilayah perwakilan luar negeri yang dibentuk oleh Dewan pimpinan pusat partai. Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi moderat, artinya partai Muslim tetapi tidak Islamis. Partai ini didirikan oleh Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid di Jakarta pada 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriah) yang mendapat dukungan kuat dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruhiat, Mustofa Bisri dan Muchith Muzadi.

Strategi politik yang dilakukan oleh PKB di Kabupaten Cirebon memanglah menarik dan cenderung unik, strategi politik dalam upaya pemenangan merupakan hal yang penting. Strategi politik adalah upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan politis, dalam proses penyusunan strategi politik juga harus mempertimbangkan strategi lawan politiknya. Selain itu dalam penerapan strategi politik juga sangat penting dalam memperhatikan profil, program kerja, dan yang terpenting ialah kemampuan dari seorang kandidat. Sehingga akan didapat strategi politik yang nantinya digunakan dalam kontestasi politik. Melalui kontes pilkada, strategi politik yang nantinya akan dibuat juga harus memperhatikan kondisi masyarakat seperti bagaimana kehidupan sosial budaya dan mayoritas penduduknya dari segi pendidikan,

mata pencaharian maupun kepercayaan. Dalam pengorganisasian peran individu atau calon kepala daerah juga sangat penting dalam penyusunan strategi politik. Hal tersebut karena masyarakat akan sangat mempertimbangkan sosok seperti apa yang pantas untuk bertarung dalam pilkada.

Implementasi fungsi pendidikan politik oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon terhadap generasi muda telah dilakukan melalui sosialisasi pemilu, kaderisasi, serta pendekatan komunitas berbasis keagamaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jangkauan, dominasi kepentingan elektoral, serta belum optimalnya pendidikan politik berkelanjutan di kalangan pemuda.

Selain memiliki kepengurusan di tingkat pusat, partai politik yang berbasis Islam salah satunya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB sangat gigih dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam dan mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha Allah Subhanahu Wata'ala. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga tersebar beberapa kota/kabupaten salah satunya di Kabupaten Cirebon. PKB di Kabupaten Cirebon merupakan partai politik yang bisa dikatakan besar karena pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 mendapatkan 3 kursi yang pada saat itu partai-partai besar lainnya mendapatkan jumlah kursi yang sama. Pada tahun 2019 PKB mendapatkan 10 kursi di jajaran lembaga legislatif.

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang seharusnya mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu atau kelompok. Pada realita yang terjadi menurut data yang paling akurat untuk mengukur kekuatan Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Cirebon adalah melalui perolehan kursi hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun-tahun tersebut. Tahun 2014-2019 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perolehan kursi 8 kursi posisi pimpinan dewan fraksi PKB pimpinan dewan, Tahun 2019-2024 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perolehan kursi 10 kursi posisi pimpinan dewan sebagai Ketua DPRD kabupaten Cirebon bernama H. Mohammad Luthfi, S.T.,

M.Si dan di tahun 2024-2029 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perolehan kursi 9 kursi posisi pimpinan dewan sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Cirebon bernama H. R. Hasan Basori, S.E., M.Si.

Peran partai dalam melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menulis judul tesis **“Implementasi Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presfektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi di DPC PKB Kabupaten Cirebon)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana implementasi partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada pemilihan umum di kabupaten cirebon presfektif dari undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik?
2. Bagaimana efektifitas partai politik dalam pemilihan umum di daerah Cirebon dalam mencerdaskan pendidikan politik bagi masyarakat?
3. Bagaimana bentuk strategi dan metode yang digunakan Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan pendidikan politik guna menghadapi kontestasi Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada pemilihan umum di

Kabupaten Cirebon berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada pemilihan umum di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis dan merumuskan strategi politik yang diterapkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam upaya kemenangan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Cirebon sehingga dapat dijadikan sebuah penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk partai politik
 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi partai politik di Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti pemilihan umum.

E. Kerangka konseptual

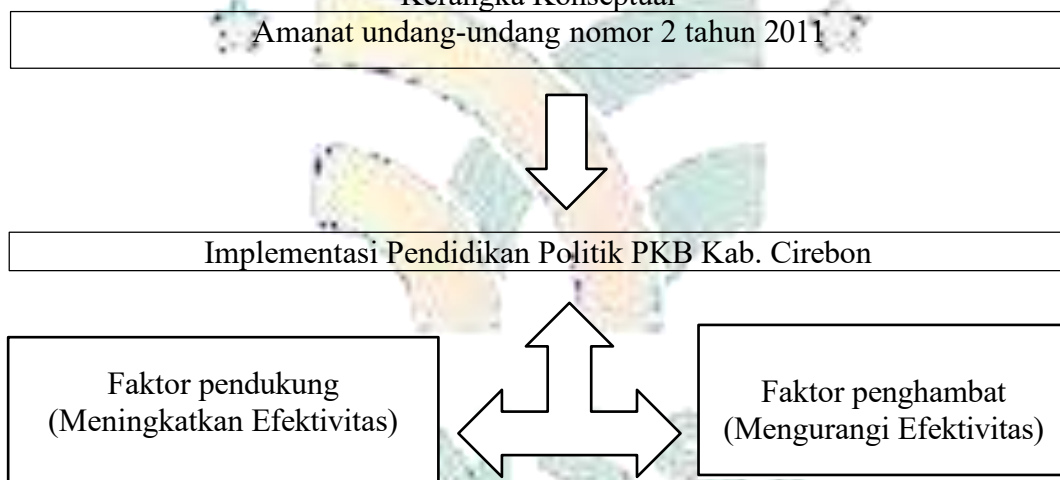
Kerangka konseptual menyelenggarakan Pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu, pendidikan politik ini penting untuk membentuk pemahaman warga negara tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berpolitik.

Kerangka konseptual pemikiran yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep utama dalam penelitian saling berhubungan dan digunakan untuk menganalisis masalah hukum yang diteliti. kerangka konseptual berfungsi

sebagai jembatan antara teori dan data, serta membantu peneliti menjaga fokus dan konsistensi dalam proses analisis. Maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yaitu berikut :

1. Douglass C. North “Menganalisis bagaimana undang-undang nomor 2 tahun 2011 (sebagai institusi formal) membatasi dan membentuk perilaku PKB dalam menjalankan fungsi pendidikan politik”,
2. James G. March & Johan P. Olsen “Meninjau apakah PKB menjalankan pendidikan politik karena adanya kewajiban formal dari undang-undang, bukan semata-mata karena kalkulasi kepentingan elektoral”,
3. Robert Putnam “Mengukur efektivitas implementasi pendidikan politik PKB berdasarkan standar formal undang-undang dan praktik empiris di lapangan”.

Tabel 1.1
Kerangka Konseptual



F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Penelitian ini berpijak pada kajian-kajian literatur yang ada. Maka dari itu untuk melengkapi karya tesis yang ilmiah, berikut peneliti kemukakan beberapa buku atau literatur berkaitan, adapun penelitian yang relevansi dengan penelitian ini diantaranya:

A. R. Setyawati S2 Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) dalam tesisnya yang berjudul Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Menggunakan landasan normatif yang sama (Undang-undang nomor 2 tahun 2011) dan fokus pada implementasi di tingkat daerah, meski partainya berbeda, cocok untuk membandingkan kepatuhan hukum.

Khoirul Anam S1 Ilmu Politik/Pemerintahan, Universitas Airlangga (UNAIR) yang berjudul skripsinya Efektivitas Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Pada Masyarakat (Studi Kasus di DPC PKB Kabupaten Lamongan). Mengambil PKB sebagai studi kasus dan membahas efektivitas pendidikan politiknya. Memberikan gambaran mengenai strategi kelembagaan PKB.

M. Wildan S2 Ilmu Administrasi/Manajemen, Universitas Pasundan (UNPAS) dengan berjudul Manajemen Strategi Organisasi dan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Mutu Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon. PKB Kabupaten Cirebon Meski fokusnya internal (mutu kader), datanya sangat berguna untuk memahami konteks DPC PKB Cirebon.

Iwan setyawan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro (UNDIP) yang berjudul peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat dikabupaten batang. Menganalisis peran partai politik secara umum di tingkat kabupaten, yang memberikan kerangka operasional mengenai bentuk-bentuk kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan.

Yuliana juwita ilmu politik universitas sriwijaya (UNSRI) yang berjudul peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di kota Palembang. Fokus pada bagaimana partai politik mengimplementasikan fungsi edukatifnya untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, yang merupakan tujuan utama penelitian.

Rizki Ersas Pratama Putera Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017 dalam tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kota Surakarta”. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan

pendidikan politik oleh partai politik masih belum efektif dan efisien belum adanya pendidikan politik secara berkelanjutan terhadap masyarakat luas karena belum ada program khusus dalam penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada pelaksanaan pendidikan politik, sedangkan yang akan penulis teliti adalah peran partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.¹⁰

Nasrullah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “Peran Partai Politik Islam Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sidoarjo Periode 2009-2014: Analisis UU No: 2/2011 Tentang Partai Politik”. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah model pendidikan politik yang diterapkan kepada masyarakat dan anggota meliputi model dialog interaktif, bakti sosial, training orientasi partai, advokasi terhadap masyarakat, dan pengkaderan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada partai politik islam untuk melakukan pendidikan politik kepada kader partai dan masyarakat, sedangkan yang akan penulis teliti adalah peran partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik untuk bagi masyarakat.¹¹

Azy Pramono Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Bangka Belitung. “Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Kabupaten Bangka Belitung Timur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat Belitung Timur dapat di katakan telah terlaksana

¹⁰ Rizki Ersas Pratama Putera, “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kota Surakarta”, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2017).

¹¹ Nasrullah, “Peran Partai Politik Islam Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sidoarjo Periode 2009-2014: Analisis UU No: 2/2011 Tentang Partai Politik”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

dengan berbagai program kepada masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih terfokus pada sejauhmana pendidikan politik dapat mempengaruhi demokrasi, sedangkan yang akan penulis teliti adalah peran partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik untuk bagi masyarakat dan faktor-faktor penghambat dan pendukung peran partai politik.¹²

Muhammad Daffa Daud, dengan judul “Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi Atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan” (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).¹³ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Partai Politik dalam melakukan pendidikan politik di daerah Tangerang Selatan. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Sedangkan perbedaannya ialah, pendidikan politik ini menggunakan studi kasus partai Golongan Karya (Golkar), dan lokasi yang di teliti di Tangerang Selatan.

Kamaluddin dengan judul “*Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)*” (UIN Aluiddin, Makasar, 2016).¹⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan politik dengan partisipasi politik, dan terbukti jika pengetahuan mengenai politik di masyarakat tinggi, secara otomatis partisipasi politik juga akan meningkat. Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai pendidikan politik bagi masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah, penelitian ini tidak memfokuskan mengenai pendidikan

¹² Azy Pramono, “*Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Kabupaten Bangka Belitung Timur Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Bangka Belitung, 2018.

¹³ Muhammad Daffa Daud, *Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi Atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁴ Kamaluddin, *Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)* (Makasar: UIN Aluiddin, Makasar, 2016).

politik yang dilakukan oleh partai politik, namun lebih memfokuskan pada pendidikan politik yang dilakukan secara umum, namun berorientasi pada partisipasi pilkada di masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Jurnal/Tesis/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizki Ersas Pratama Putera, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pelaksanaan Pendidikan Politik menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang partai politik di kota Surakarta	Peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik	- penelitian di kota Surakarta -Faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat -Fokus ke kader partai dan masyarakat -partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
2.	Nasrullah, Tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	“peran partai politik islam dalam Pendidikan politik bagi masyarakat sidoarjo	Peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik	-Penelitian di Sidoarjo dan hanya fokus pada partai politik islam. - menekankan peran partai politik Islam. - memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat melibatkan lebih

		periode 2009-2014 : analisis UU No 2 Tahun 2011 Tentang partai politik		dari satu partai politik Islam. - meneliti partai politik Islam secara umum (bisa meliputi PKB, PPP, PKS, PAN jika dikategorikan sebagai partai berbasis Islam).
3.	Azy Pramono Tahun 2018 Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Bangka Belitung	“Peran Partai Politik Dalam Memberika n Pendidikan Politik Bagi masyarakat dalam mewujudka n di kabupaten bangka Belitung timur di tinjau dari undang- undang No 2 Tahun 2011 Tentang	Sama-sama terkait dengan peranan partai politik dan Pendidikan politik	-Membahas mengenai sejauh mana Pendidikan politik mempengaruhi demokrasi. -Partai politik di Kabupaten Bangka Belitung Timur (dapat melibatkan beberapa partai). -Pendidikan politik secara umum dalam masyarakat.

		Partai Politik		
4.	Muhammad Daffa Daud, UIN Hidayatullah, Jakarta, 2019	Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi Atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan	penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik	-pendidikan politik ini menggunakan studi kasus partai Golongan Karya (Golkar), dan lokasi yang di teliti di Tangerang Selatan. -Lebih berorientasi pada ilmu politik atau administrasi politik. -program pendidikan politik, yaitu bentuk kegiatan, metode, sasaran, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Partai Golkar.
5.	Kamaluddin, UIN Aluiddin, Makasar, 2016	Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak	penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai pendidikan politik bagi masyarakat	-penelitian ini tidak memfokuskan mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, namun lebih memfokuskan pada pendidikan politik yang dilakukan secara umum, namun berorientasi

		Tahun 2015)		pada partisipasi pilkada di masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. -Hubungan pendidikan politik dengan partisipasi politik masyarakat. -pengaruh atau hubungan pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat.
6.	A. R. Setyawati S2 Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII)	Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	Sama-sama terkait dengan implementasi partai politik dan Pendidikan politik	-Membahas mengenai sejauh mana Pendidikan politik mempengaruhi demokrasi. -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Implementasi fungsi pendidikan politik secara umum. -menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh PDI Perjuangan berdasarkan ketentuan

				undang-undang. Kajiannya lebih umum karena tidak membatasi konteks tertentu, seperti pemilu.
7.	Khoirul Anam S1 Ilmu Politik/Pemerintahan, Universitas Airlangga (UNAIR)	Efektivitas Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Pada Masyarakat (Studi Kasus di DPC PKB Kabupaten Lamongan	Sama-sama terkait dengan pendidikan politik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	-Membahas mengenai Pendidikan politik mempengaruhi demokrasi pada masyarakat. -Mengukur efektivitas pendidikan politik yang dilakukan PKB Ilmu politik/administrasi publik (evaluatif) Tingkat keberhasilan atau efektivitas program pendidikan politik. -menggunakan konsep efektivitas
8.	M. Wildan S2 Ilmu Administrasi/Manajemen, Universitas Pasundan (UNPAS)	Manajemen Strategi Organisasi dan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Mutu Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon	Sama-sama terkait dengan pendidikan politik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Cirebon	-Membahas mengenai Strategi organisasi dan Pendidikan politik dalam meningkatkan kader partai. -Manajemen strategi organisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan mutu kader. - pendidikan politik internal,

				yaitu pendidikan bagi kader PKB untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kapasitas mereka.
9.	Iwan setyawan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro (UNDIP)	Peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di kabupaten batang.	Sama-sama terkait dengan pendidikan politik	-memfokuskan mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, namun lebih memfokuskan pada pendidikan politik yang dilakukan secara umum di kabupaten batang dan kabupaten Cirebon. -Peran partai politik dalam Pendidikan politik masyarakat Dapat mencakup seluruh partai politik di daerah. -menitikberatkan pada peran partai politik. Penelitian lebih bersifat deskriptif, misalnya mengidentifikasi bentuk peran, kontribusi, serta kendala partai politik

				dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Batang
10	Yuliana juwita Ilmu politik universitas sriwijaya (UNSRI)	partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di kota palembang	Bagaimana partai politik mengimplementasikan fungsi edukatifnya untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat	-Memfokuskan mengimplemen tasi fungsi Pendidikan politik masyarakat di kota palembang dengan di kabupaten Cirebon. -Peran atau aktivitas partai politik dalam pendidikan politik masyarakat secara umum Dapat melibatkan berbagai partai politik di daerah. - partai politik dalam pendidikan politik masyarakat secara umum. Peneliti dapat mengkaji berbagai bentuk kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh beberapa partai politik di Kota Palembang tanpa mengaitkannya secara khusus

				dengan ketentuan hukum tertentu.
--	--	--	--	----------------------------------

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi efektivitas peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat pada pemilihan umum di tinjau undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki peran langsung dalam kegiatan pendidikan politik, untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai peran partai politik (DPC partai kebangkitan bangsa kabupaten Cirebon). Wawancara ini bertujuan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terkait. Proses analisis data dilakukan secara bertahap, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan melihat bagaimana ketentuan hukum (Normatif) tentang pendidikan politik dijalankan dalam praktik di lapangan oleh partai politik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian normatif - empiris dengan pendekatan kualitatif ini berusaha memahami makna, peran, dan praktik partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik secara mendalam melalui deskripsi naratif, bukan bentuk angka atau statistik.

Tujuannya adalah menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk pengurus partai, masyarakat, lembaga terkait, dan mengenai implementasi fungsi pendidikan politik dilakukan oleh DPC Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kabupaten Cirebon.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa interview, wawancara langsung dengan pengurus DPC Fraksi Partai

PKB Kabupaten Cirebon, yaitu : Observasi terhadap kegiatan partai yang terkait dengan pendidikan politik.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, jurnal, artikel, media massa terkait aktivitas partai, dokumen atau laporan kegiatan dari DPC Partai, dan dokumen kegiatan dari DPC Partai.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, mengambil lokasi penelitian di Kantor DPC Partai PKB Kabupaten Cirebon. Yang mana dalam memilih dengan berbagai pertimbangan Partai Politik, DPC Partai politik sehingga cukup menarik untuk diteliti.

4. Teknik Pengambilan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut :

a. Observasi

Mengamati secara langsung kegiatan partai yang berhubungan dengan pendidikan politik (Jika sedang berlangsung atau melalui dokumentasi).

b. Interview/wawancara

Interview adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat di bangun makna dalam topik tertentu.

Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan pengurus kedua partai dan peserta kegiatan pendidikan politik. Peneliti menggunakan pendoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interview menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan mencerminkan realitas empiris (Lapangan) terhadap ketentuan normatif (Hukum). Peneliti membandingkan :

- a. Apakah kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai telah sesuai dengan fungsi partai politik dalam Pasal 11 No. 2 Tahun 2011,
- b. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik tersebut memengaruhi pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilu,
- c. Apakah terdapat perbedaan strategi antara partai pkb dalam pelaksanaan pendidikan politik di kabupaten cirebon.

Tabel 1.3

Informan Penelitian

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Cirebon	Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Cirebon
H. Jamil Abdul Latief, Lc., M.E	Waswin Janata, S.H

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan penulisan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan penulisan tesis ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Partai Politik, Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat, Partisipasi Politik Dan Pendidikan Politik

Bab ini membahas mengenai landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang partai politik, tinjauan umum tentang partisipasi masyarakat, tinjauan umum tentang partisipasi politik, serta tinjauan umum tentang pendidikan politik yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Bab III: Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta kondisi objektif yang berkaitan dengan objek penelitian. Uraian dalam bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, kedudukan dan peran dewan pimpinan cabang pkb kabupaten cirebon, kondisi objektif pelaksanaan Pendidikan politik oleh dewan pimpinan cabang pkb kabupaten cirebon, dasar hukum pendidikan politik oleh partai politik, analisis kesenjangan antara ketentuan normative dan praktik empiris, dan upaya optimalisasi pelaksanaan pendidikan politik oleh dewan pimpinan cabang pkb kabupaten cirebon.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan serta analisis dan pembahasan berdasarkan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan dilakukan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Bab V: Penutup

Bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab empat. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak